

Ambalat Netwar antara Indonesia -Malaysia, 2005: Refleksi Teoritis Mengenai Hubungan Internasional di Era Internet

Ludiro Madu

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta

Abstract

For the first time in the history of Indonesia-Malaysia relationships, both neighbouring countries involved in a war that surprisingly underwent in networks of online computers throughout the world generally coined 'netwar' or 'cyberwar'. Conflicted claim over natural resources-rich Ambalat area between both countries were unavioded as a Malaysian State-Owned oil company (Petronas) gave exploration rights to a Dutch-based overseas oil company, Shell. This led to protests and demonstrations from the government of Indonesia and its people. Protracted crisis continued to online activisms that resulted in cyberattacks to many websites belong to both sides. This paper explains to what extent this online crisis or netwar took place and its implication to the dynamics of International Relations in the Internet area. By locating netwar in the study of International Relations (IRs), this paper finds that the phenomenon of Ambalat netwar shows the continuing implication of globalization. Globalization has resulted in the increasing role of non-state actors and the decreasing role of state actors in global politics. More importantly, the internet era undoubtedly increases the role of individu in using the internet for undertaking online political activism, both nationally and globally. In line with this tendency, Ambalat netwar raised the role of individu in shaping the relationships, especially in the forms of conflict and cooperation, among nations , with special reference of Indonesia and Malaysia.

Knowledge is power (Francis Bacon)

Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*) telah mengubah pola-pola interaksi antarindividu tanpa mengindahkan lagi batas-batas negara. Globalisasi memang membebaskan aliran barang, jasa, dan manusia dalam melintasi wilayah-wilayah negara, namun aspek fisik teritori negara masih ada. Sedangkan, internet semakin mendorong aliran faktor-faktor produksi itu tanpa harus merasakan aspek teritori sebuah negara tertentu secara fisik. Di era internet, pola-pola interaksi bahkan cukup dilakukan di depan layar komputer yang terhubung secara *online* dengan komputer-komputer lain di seluruh dunia. Jaringan internet antar komputer tidak lagi mengenal batas fisik sebuah negara. Batas fisik teritori sebuah negara sebagai pembatas dari negara lain telah mengabur di abad internet. Sebagaimana kutipan di awal tulisan ini, interaksi antarindividu di jaringan internet secara tidak sadar telah melampaui batas-batas negara.

Persoalan muncul ketika pola-pola interaksi di abad internet justru berlangsung dalam situasi krisis atau konflik dalam hubungan antara dua negara. Krisis Ambalat antara Indonesia dan Malaysia di awal tahun 2005 menjadi contoh menarik. Sejak krisis Ambalat, ketegangan hubungan bilateral kedua negara meluas ke berbagai persoalan, seperti klaim Malaysia terhadap beberapa produk



budaya Indonesia (Rasa Sayange, kain batik, kesenian Angklung, Reog Ponorogo, dll.), patok perbatasan yang bergeser ke wilayah Indonesia, rekrutmen warga negara Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi Askar Wantaniyah (semacam milisi sipil dari Tentara Diraja Malaysia), dll. Namun, berbagai persoalan tersebut ternyata tidak menimbulkan *cyberwar* dengan intensitas dan eskalasi konflik *online* setinggi krisis Ambalat. Oleh karena itu, krisis Ambalat, terutama aktivisme *netwar*-nya, menjadi menarik

untuk dianalisis berkaitan dengan implikasi teoritisnya terhadap studi Hubungan Internasional (HI). Di masa depan, isu aktivisme *online* yang melintasi batas-batas negara di era dunia tanpa batas ini bukan tidak mungkin menjadi sebuah isu strategis yang perlu mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak.

Krisis Ambalat berawal dari klaim Malaysia dalam kepemilikan atas Pulau Ambalat. Klaim itu muncul dalam keputusan perusahaan minyak milik Malaysia, Petronas, yang memberikan konsesi pertambangan di Pulau Ambalat kepada

perusahaan minyak milik Belanda, Shell. Klaim itu menimbulkan silang pendapat antara Indonesia dan Malaysia. Berbagai upaya diplomasi bilateral telah dilakukan kedua belah pihak, dari pertemuan tingkat menteri terkait hingga antara Presiden RI dengan PM Malaysia. Namun, penyelesaian bilateral itu tidak bisa meredakan kemarahan masyarakat Indonesia terhadap klaim kepemilikan Malaysia atas Pulau Ambalat. Demonstrasi kelompok-kelompok masyarakat Indonesia berlangsung selama beberapa hari dan bahkan meningkat hingga tuntutan kepada pemerintah RI agar berperang dengan Malaysia.

Krisis Ambalat 2005 memang tidak menimbulkan perang antara tentara nasional kedua negara, namun perang dalam bentuk lain justru berlangsung di jaringan internet di antara para *netizen*. Perang konvensional dalam bentuk pengerahan tentara nasional memang tidak terjadi, namun krisis itu telah menyebabkan 'perang' dalam bentuk yang berbeda di jaringan internet, yang lebih dikenal dengan istilah *netwar*. Dalam tulisan ini, istilah *cyberwar*, *netwar*, dan *online war* digunakan secara bergantian karena ketiga istilah ini pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu peperangan di jaringan internet. Meski demikian, Arquilla & Ronfeldt memberi nuansa yang agak berbeda antara *cyberwar* dan *netwar*. *Cyberwar* lebih merujuk pada *knowledge-related conflict at the military level*, sedangkan *netwar* lebih berkaitan dengan perjuangan masyarakat yang melibatkan konflik berintensitas rendah yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, seperti teroris, kartel obat-obatan, atau perluasan *weapons of mass destruction* (WMD) (Arquilla & Ronfeldt 1993 dan 1996).

Fenomena Ambalat *netwar* tidak pernah diduga sebelumnya oleh Indonesia dan Malaysia. Untuk pertama kalinya, internet mempengaruhi hubungan kedua negara. Aktivisme internet ternyata ikut memperburuk krisis Ambalat. Internet tidak hanya berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi interaktif demi meraih tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan politik domestik, namun telah digunakan untuk menyerang pihak lain, dengan konsekuensi dapat mempengaruhi hubungan kerjasama dan konflik antar negara. Realitas aktivisme *online* mengenai intensitas dan potensi implikasi dari *netwar* yang melibatkan berbagai individu dari berbagai bangsa ternyata belum banyak mendapat perhatian, apalagi dalam kasus hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Dalam konteks di atas, tulisan ini menjelaskan dua persoalan: (1) bagaimana Ambalat *netwar* berlangsung? (2) apa implikasi teoritis dari kasus *netwar* ini bagi studi HI? Fokus bahasan lebih diarahkan kepada dimensi politik dari pemanfaatan internet yang tidak hanya terbatas di tingkat domestik sebuah negara, namun internet juga dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi hubungan konflik dan kerjasama antar negara, khususnya pada kasus Indonesia-Malaysia. Hubungan antar negara di era internet pada saat ini tidak lagi terbatas hanya melibatkan aktor-aktor negara ---dalam perspektif Hegelian, negara merupakan

satu-satunya pihak yang paling otoritatif dalam penggunaan kek erasan--- semata, namun juga menunjukkan kecenderungan meningkatnya peran dan pengaruh aktor-aktor individu.

***Netwar* dalam Hubungan Internasional**

Fenomena *netwar* menunjukkan bahwa pemanfaatan internet tidak hanya berkuat pada sekat-sekat teknis komputasi dan teknologi informasi-komunikasi. Berbagai kegiatan riset akademis mulai berusaha meneliti dan memahami dimensi sosial dan politik dari perkembangan pesat internet. Minat para ilmuwan politik pada umumnya dan penstudi ilmu HI pada khususnya semakin tumbuh seiring dengan semakin pentingnya peran internet dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara-negara maju. Hal itu mendorong perkembangan studi internet semakin diwarnai oleh kecenderungan bahwa hampir semua aktivitas sosial politik telah mengalami migrasi dari yang semula hanya bersifat *offline* ke *online* (Resnick 1998, 54 & 60; Warkentin 2001; Abbott 2001, 101). Perpindahan aktivisme dari wilayah *offline* ke *online* ini terjadi pada krisis Ambalat. Kegiatan protes dan demonstrasi yang pada awalnya lebih banyak dilakukan di jalanan di berbagai kota di Indonesia meluas ke ke jaringan internet dalam bentuk *netwar* atas berbagai situs milik Malaysia.

Pada awalnya, pemanfaatan internet dimanfaatkan sebagai media alternatif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi (Abbott 2001, 99). Masyarakat menjadi pihak yang diuntungkan dari perluasan jaringan telekomunikasi berbasis internet ini, khususnya di negara-negara maju dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang telah mapan. Keleluasaan masyarakat terhadap akses informasi menjadikan masyarakat memiliki semacam kekuasaan untuk menentukan informasi yang diinginkan. Perluasan akses atas informasi ini menyebabkan masyarakat muncul sebagai aktor utama penyedia informasi. "*Power to people*" menjadi istilah populer (Robbles, 2001) untuk menjelaskan semakin besarnya akses dan kuasa masyarakat dalam memperoleh dan menyediakan informasi (Toulouse 1998, 4 & 6) tanpa terbatas pada wilayah negara tertentu (Everard 2000).

Selanjutnya, kecenderungan pemanfaatan internet juga melebar ke bidang politik. Fungsi internet berkembang menjadi media alternatif untuk mendorong demokratisasi (Margolis & Resnick 2001, 14-21). Di negara-negara maju, infrastruktur teknologi informasi yang merata dan tingkat 'melek' internet (*internet literacy*) yang tinggi telah memungkinkan negara-negara itu melaksanakan pemilihan umum dengan memanfaatkan internet. Perluasan peran politik internet ini menghasilkan banyak studi penting mengenai *e-democracy*, *e-election*, *e-government*, dan sebagainya. Internet secara umum digunakan untuk

tujuan peningkatan akses masyarakat atas informasi dan pemberdayaan politik dalam konteks domestik.

Sementara itu, dalam studi HI, peran dan pengaruh internet dalam hubungan antarnegara mulai mendapat perhatian sejak awal 1990-an. Mengikuti perkembangan awal internet yang dibangun oleh militer AS melalui program ARPANET 1986, pemanfaatan internet dalam situasi konflik dan, bahkan, perang terjadi pada masa Perang Teluk pertama tahun 1992 (Arquilla & Ronfeldt 1993). Pada saat itu, internet dipakai oleh militer AS untuk mengoordinasi serangan ke sasaran-sasaran strategis milik Irak. Kemudian pada akhir 1990-an, pada masa perang Bosnia, rakyat Bosnia menggunakan jaringan internet untuk mengganggu sistem pertahanan/militer NATO. Pemanfaatan internet semacam ini memperlihatkan kecenderungan baru bahwa individu mulai memanfaatkan internet dan jaringannya untuk melawan kekuatan militer regional hegemonik di wilayah Eropa (Barat), yaitu NATO.

Selain itu, pemanfaatan internet sebagai media informasi alternatif juga dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan internasional, misalnya dalam Perang Irak 2001. Di tengah ketidaktahuan dunia internasional mengenai situasi domestik Irak setelah serangan awal pasukan PBB pimpinan Amerika Serikat (AS), seorang warga Irak menggunakan internet untuk menuliskan situasi Irak melalui *blog* pribadi (Drezner 2002). Dalam kasus Ambalat *cyberwar*, warganegara Indonesia menggunakan jaringan internet untuk 'menyerang' representasi *online* dari negara lain, khususnya Malaysia. Pejuang-pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) juga menggunakan internet untuk memperoleh dukungan internasional (Madu 2002). Istilah-istilah *cyberwar* atau *netwar* dan *cyberattack* memperlihatkan semakin meningkatnya kapabilitas dan kapasitas aktor-aktor non-negara dalam 'mengimbangi' otoritas dan kemampuan sistem pertahanan milik negara atau kelompok negara, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Cyberwar sebagai salah satu bentuk konflik di era internet telah diteliti oleh J. Arquilla dan Ronfeldt D. melalui tulisannya *Cyberwar is Coming* (1993). Mereka menjelaskan era teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT) telah melahirkan isu-isu baru dalam studi keamanan global. Ronald Deibert mempublikasikan *Virtual Resources: International Relations Research Resources on the Web* (1998) di jurnal *International Organization* menguraikan secara komprehensif mengenai peran internet dalam menyediakan banyak akses penting bagi penstudi HI, pengambil kebijakan, dan pengamat politik internasional ke berbagai sumber informasi akademis mengenai studi HI dan berbagai lembaga internasional.

Dalam kasus Ambalat, *netwar* antara warganegara Indonesia dan Malaysia mengambil bentuk "serangan" ke berbagai situs masing-masing pihak (lihat tabel

1 & tabel 2). *E-ganyang* (lihat slogan *e-ganyang*) menjadi representasi simbolik pihak Indonesia untuk 'menyerang' berbagai situs yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi pemerintah, non-pemerintah, dan individu Malaysia. Sebaliknya, pihak Malaysia memakai jargon *e-godam*¹ untuk membalas aktivisme internet dari pihak Indonesia dalam Ambalat *netwar*.

Bentuk Slogan *E-ganyang*



sumber: Bee, 2005. Gerakan "Ambalat Belongs to Indonesia". [online]. 10 Maret. dalam http://beogeography.modblog.com/?show=blogview&blog_id=502615 [diakses 25 April 2006].

Seiring dengan perkembangan pesat ICT, studi HI semakin tidak bisa dipisahkan dari peran dan pengaruh internet, misalnya, dalam upaya membentuk *global society*. Dalam dunia, yang menurut Thomas Friedman, makin mengglobal dan mendatar saat ini, internet juga ikut mereduksi batas-batas fisik antarnegara. Di era internet, batas-batas antarnegara tidak lagi ditandai oleh wilayah teritorial-geografis ala Perjanjian Westphalia. Dalam konteks ini, *cyberwar* atau *online war* menawarkan dimensi berbeda dari kecenderungan keamanan atau perang konvensional selama ini yang dikenal *offline war*.

E-Ganyang Versus E-Godam

Ilmuwan politik David Resnick menempatkan pengaruh kedua moda itu ke dalam bentuk aktivisme *online politics which impacts the Net* (Resnick 1998, 54-60). Aktivisme politik dalam krisis Ambalat menjadi tidak hanya terbatas di wilayah *offline* atau *online* secara terpisah, tanpa ada kaitan masing-masing. Kasus Ambalat *netwar* merupakan fenomena baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan bilateral, kedua negara ini menerima akibat politik yang cukup signifikan dari aktivisme *online* di antara para *netizen* masing-masing.

Selain *politics which impacts the Net*, Resnick juga mengungkapkan dua bentuk lain mengenai aktivisme politik di wilayah *online*, yaitu *politics in the Net* dan *politics on the Net*. Pertama, *activism in the internet* merujuk pada aktivisme *online* yang bersifat teknis-komputasi. Aktivisme ini berkaitan dengan

¹ *E-godam* berasal dari kata *godam* (bahasa Melayu), yang artinya kurang lebih sama dengan *ganyang*. Berbeda dengan *e-ganyang*, slogan *e-godam* tidak menampilkan simbol tertentu.

perkembangan terbaru, persoalan, dan masa depan internet; Sedangkan, *politics on the Net* menjelaskan aktivisme berpolitik di dalam jaringan internet. Aktivisme semacam ini juga menyentuh persoalan mengenai fungsi internet sebagai alat atau media untuk berpolitik.

Ambalat *cyberwar* memperlihatkan bahwa bentuk aktivisme *politics on the Net* merupakan akibat dari *politics which impacts the Net*. Ambalat *cyberwar* direpresentasikan dalam bentuk *e-ganyang* dan *e-godam* sebagai 'wahana perang' antara rakyat Indonesia dengan rakyat Malaysia. Aktivisme *e-ganyang* dari pihak Indonesia merupakan reaksi atas perkembangan situasi krisis Ambalat di wilayah *offline*, sedangkan aktivisme *e-godam* lebih merupakan reaksi terhadap serangan dari *e-ganyang*. Krisis Ambalat menimbulkan *cyberattack* dari para *netters* Indonesia terhadap situs-situs milik lembaga swasta dan pemerintah Malaysia. Aksi serangan tersebut mengakibatkan tindakan balasan dari *netters* Malaysia. Lebih jauh, tindakan saling serang di wilayah *online* ini juga memunculkan kekawatiran di antara berbagai pihak yang berujung pada himbuan agar tindakan tersebut diakhiri.

Aksi *cyberattacks* dalam krisis Ambalat telah menimbulkan 'korban' lebih dari 50 situs dari pihak Indonesia dan Malaysia (lihat Tabel 1 & Tabel 2) (Matnet 2005). Situs-situs dari kedua negara yang menjadi 'korban' secara umum terdiri dari situs milik lembaga pemerintah dan swasta. Situs pemerintah yang 'diserang' meliputi situs milik pemerintah daerah (Tulungagung, KPU Surabaya), negara bagian (Sultan Perak), departemen (misalnya Royal Malaysian Customs, Perak Veterinary Department), dan universitas (Universiti Sains Malaysia, Multimedia University). Sedangkan situs-situs milik lembaga swasta, seperti universitas (STIEP, STIE Primavisi), perusahaan (Wijaya FM), dan organisasi (Gafeksi, Ginsi Jatim).

Berbeda dari perang sebenarnya (*offline war*) yang melibatkan pengerahan tentara bersenjata dengan korban jiwa dan harta benda, *e-nasionalisme* Ambalat menimbulkan 'korban' berupa situs. Berbeda pula dari nasionalisme teritorial dan *offline* yang berjuang mempertahankan wilayah geografis, *e-nasionalisme* Ambalat memperjuangkan 'kapabilitas' situs yang menjadi target *cyberattack*. Karena itu, situs-situs tersebut tidak lagi sekadar berfungsi sebagai media informasi publik di era globalisasi, namun juga menjadi representasi *online* bagi identitas politik sebuah negara.

Pada umumnya aksi *cyberattack* dalam krisis Ambalat mengambil bentuk *defacement*, yaitu tindakan mengubah wajah atau tampilan awal (halaman pertama) situs tertentu menjadi berbeda dari wajah asli situs tersebut. Gambar 1 dan Gambar 2 merupakan contoh dari serangan *deface* yang berupa kata-kata dan gambar. Gambar 1 adalah situs milik Sultan Perak Malaysia (pejsultanperak.gov.my) yang menjadi salah satu korban *e-ganyang*. Situs

tersebut diubah tampilannya menjadi bergambar merah putih seperti lambang bendera Indonesia disertai kalimat " *Warning to Abdulah Badawi: Neraka akan menunggu jika engkau mengambil hak orang lain. Ingat hal itu! Indonesia Siap tuk Perang.*" Situs ini juga diberi tulisan kelima sila Pancasila. *E-ganyang* juga menimpa situs Yellow Pages Malaysia (klpages.com), sehingga lagu Indonesia Raya akan langsung terdengar ketika membuka situs tersebut. Pesan berupa " *Message to the Perdana Menteri Dato' Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi: u want a WAR? We'll give you a WAR!!! Message to the Malaysian government: Retreat from Indonesian area A.S.A.P!!! Ganyang MALAYSIA!!!* " (Hidayat 2005).

Berbeda dengan situs-situs Malaysia lainnya yang secara umum mengalami satu kali serangan *e-ganyang*, situs Universiti Sains Malaysia (*www.usm.my*) dan Jabatan Kerja Raya harus menjadi korban *hacktivisme e-ganyang* sebanyak dua kali. Aksi-aksi *e-ganyang* menyebabkan para *hacker* Malaysia melancarkan serangan balik, misalnya ke situs milik Departemen Dalam Negeri RI dan lain-lain (seperti pada Tabel 2). Gambar 2 memperlihatkan situs Akademi Komunikasi Indonesia (AKINDO, Yogyakarta) yang 'diserbu' tank Malaysia. *Deface* berupa gambar tank yang diikuti empat pesawat terbang di belakangnya ditambah pesan "Pertahankan Malaysia". Beberapa contoh situs-situs lain yang menjadi korban *e-ganyang* dan *e-godam* dapat dilihat, misalnya, di http://www.mycen.com.my/duasen/090305_hacked.html .

Gambar-gambar dan pernyataan-pernyataan nasionalistik di berbagai situs sebagai 'korban' dari aktivisme internet merupakan pesan peringatan atau protes dari satu pihak terhadap pihak lain. Intensitas *hacktivisme online* tampaknya tergantung pada eskalasi situasi krisis Ambalat di lapangan, yaitu sejauh mana manuver kapal-kapal dari satu pihak menimbulkan protes, dan mungkin, manuver balasan dari pihak lain. Manuver militer dianggap cenderung memiliki pengaruh lebih besar daripada langkah-langkah perundingan diplomasi kedua piha k terhadap aktivisme cyberwar Ambalat. Bukti asumsi ini dapat ditelusuri pada penurunan intensitas *hacktivisme* ketika manuver militer kedua belah pihak juga berkurang. Hampir sebagian besar serangan *e-ganyang* dan *e-godam* berlangsung pada bulan Maret 2005.

Defacement terhadap berbagai situs kedua negara menimbulkan beragam respon dari *netters* kedua negara. Tindakan *deface* dapat digolongkan ke dalam *hacktivisme*, yaitu tindakan bersifat merusak di jaringan internet. *Hacktivisme* sebenarnya merupakan sebuah dilema bagi studi mengenai aktivisme politik di era internet pada saat ini. Satu pendapat yang dominan mengklaim bahwa *hacktivisme* dalam rangka *e-nasionalisme* Ambalat cenderung memperburuk hubungan bilateral dan tidak mendukung perundingan diplomasi kedua negara. *Hacktivisme* dipandang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kelemahan struktur internal situs-situs tertentu. Pendukung

pandangan ini menganjurkan agar hacktivisme atas nama nasionalisme Ambalat segera dihentikan. Beberapa *netters* Indonesia secara individu maupun bersama-sama menggalang dukungan penghentian kegiatan merusak jaringan internet ini bisa ditemukan di *blogsphere*, seperti <http://priyadi.net/archives/2005/03/10/perang-ambalat-di-internet/>.

Sementara itu, kelompok lain secara umum melihat aspek politik dari tindakan *deface* itu sebagai perkembangan yang wajar di era internet pada masa kini. Dengan menggunakan pandangan McLuhan bahwa *medium is the message*, maka internet merupakan *medium* baru bagi warganegara untuk mengekspresikan nasionalisme mereka secara *online*. Serangan *cyber* melalui *e-ganyang* maupun *e-godam* dapat dianggap sebagai bentuk diplomasi antarwarganegara melalui pertukaran pesan-pesan dan gambar-gambar bersifat nasionalistik di berbagai situs milik pihak lain. Bagi pihak Indonesia, *e-ganyang* dapat menjadi bukti kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan ICT dalam membela keutuhan wilayah RI dari klaim sepihak Malaysia. *Internet literacy* masyarakat Indonesia dalam *e-nasionalisme* Ambalat dapat mengatasi persoalan kesenjangan digital, misalnya tingkat penetrasi dan persebaran jaringan internet yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ambiguitas moral terhadap hacktivisme *online* dalam Ambalat *netwar* menjadi isu menarik. Jalan keluar dari dilema ini diberikan Jim Thomas bahwa justifikasi terhadap hacktivisme bukan terletak kepada apakah hacktivisme itu benar atau salah, tetapi yang lebih penting adalah menentukan batasan-batasan antara yang benar dan yang salah dan bagaimana batasan-batasan itu dipertahankan (Thomas 2005, 599-624). Meskipun tindakan serangan *cyber* itu tergolong hacktivisme *online*, hacktivisme ini merupakan bagian dari *electronic civil disobedient*, yaitu respon kekecewaan warganegara (*netters*) terhadap pemerintahnya sendiri maupun pemerintah negara lain (Meikle 2002, 140-72).

Perbedaan pandangan di atas juga tidak menyurutkan perjuangan aktivisme *online*. Berbagai bentuk aktivisme mulai memanfaatkan karakteristik jaringan internet sebagai media baru bagi perjuangan kelompok-kelompok itu yang selama ini hanya berkonsentrasi pada perjuangan di wilayah *offline*. Aktivisme *online* bahkan dapat menjadi kelanjutan dari aktivisme *offline*. Tindakan *deface* juga terjadi pada situs BanBali.com yang menghimbau wisatawan untuk tidak mengunjungi Bali hingga Schapelle Corby dibebaskan tanpa syarat. Walaupun tidak mengganggu hubungan bilateral Indonesia-Australia, *deface* terhadap situs pendukung Corby merupakan sebuah ekspresi protes *netters*.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa aktivisme *online* memiliki dampak yang tidak lagi terbatas pada wilayah domestik, namun dapat menjangkau wilayah-wilayah

Pertautan antara aktivisme di wilayah *online* dan *offline* menciptakan hubungan intermoda, yaitu saling pengaruh di antara kedua wilayah itu. Pergeseran persoalan Ambalat dari krisis *offline* ke 'perang' *online* menjadi daya tarik penting bagi kajian HI di era internet pada saat ini. Dalam krisis Ambalat, protes masyarakat Indonesia dalam bentuk demonstrasi di berbagai kota dan tuntutan berperang dilanjutkan oleh para aktivis *online*, yang disebut sebagai *netter* atau *nettizen*. Mereka 'bergerak' dari warung-warung internet (warnet) untuk tidak sekedar melancarkan protes secara *online*, namun melangkah lebih jauh, yaitu melakukan 'peperangan' secara *online*. Protes atas ketidaktegasan respon pemerintah Indonesia dan protes atas sikap perilaku Angkatan Laut Malaysia terhadap pihak sipil dan militer Indonesia di perairan di sekitar Ambalat menjadi 'amunisi' penting bagi protes para aktivis *online* Indonesia di jaringan internet. Protes dari para aktivis *online* itu dapat disebut sebagai salah satu bentuk nasionalisme (Madu 2007). Selanjutnya, nasionalisme *netter* Indonesia diwujudkan dalam bentuk *cyberattack* ke berbagai situs (*website*) Malaysia. *Cyberattack* ini memicu tindakan serupa dari *netters* Malaysia, sehingga terjadilah yang dikenal *cyberwar* antara *netters* Indonesia dengan Malaysia.

Cyberwar sangat berbeda dengan perang konvensional. Perbedaan mendasar antara *online* dengan *offline war* terletak pada empat faktor. Pertama, aksi-aksi penyerangan *online* (*cyberattacks*) dan *netwar* hanya terjadi di jaringan internet. Jaringan internet merupakan "*battlespace*" yang dapat diperlakukan seperti arena perang dalam peperangan konvensional (Arquilla & Ronfledt 1996, 623). Sebagaimana keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antarnegara dalam hubungan internasional yang lebih berdasarkan pada wilayah geografis, struktur serupa juga tampak pada representasi negara di jalur *online*. Michael Dartnell (2001) menjelaskan potensi internet atau aktivisme *online* untuk "reconfigures competition out of a territorial locus and into a virtual one. Just as the search for territorial equilibrium led to the Westphalian state-based international order, so the search for equilibrium of Net-based knowledge and the development of power will lead to a new global power structure". Sementara itu, Keohane dan Nye (2001, 608) menegaskan bahwa "cyberspace is itself a 'place': everywhere and nowhere". Dengan demikian, pemahaman mengenai dunia yang terbagi ke dalam negara-negara dengan wilayah-wilayah perbatasannya menjadi tidak relevan lagi.

Kedua, bentuk-bentuk *cyberattack* dan *cyberwar* biasanya meliputi upaya untuk merusak tampilan halaman-halaman dari situs-situs yang menjadi target serangan. Misalnya, menambah gambar-gambar atau tulisan-tulisan bersifat mengejek atau menantang. Upaya merusak *website* ini dikenal dengan istilah *hactivism*. Di era internet, *hactivism* dapat dianggap sebagai bentuk protes politik masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat di jaringan internet. Selanjutnya, Tim Jordan (2004, 1) menjelaskan:

Hactivism is a combination of grassroots political protest with computer hacking. Hactivists operate within the fabric of cyberspace, struggling over what is technologically possible in virtual lives, and reaches out of cyberspace utilising virtual powers to mould offline life. Social movements and popular protests are integral parts of twenty-first-century societies. Hactivism is activism gone electronic.

Ketiga, target-target *cyber attack* berbentuk situs-situs internet. Situs-situs ini dimiliki oleh individu-individu, kelompok individu atau lembaga-lembaga (baik swasta maupun pemerintah). Mengikuti pandangan McLuhan bahwa *medium is the message*, maka "serangan" *online* melalui *e-ganyang* dan *e-godam* merupakan bentuk diplomasi di masa perang antarwarganegara Indonesia dan Malaysia melalui pertukaran pesan-pesan dan gambar-gambar bersifat nasionalistik di berbagai situs milik pihak lain. Di era internet pada saat ini, keberadaan sebuah negara dapat direpresentasikan dalam bentuk dan tampilan situs-situs. Akibatnya, "serangan" *online* kepada situs-situs tersebut dapat dianggap sebagai serangan terhadap otoritas dan legitimasi sebuah negara sebagai pemilik situs. Walaupun upaya merusak merupakan sebuah bentuk destruktif dari aktivisme politik *online*, realitas tersebut merupakan satu dari banyak bentuk *cyberattack* dalam konteks *netwar* demi membela kepentingan masing-masing.

Meningkatnya pemakaian internet dalam hubungan antar negara tidak dapat dilepaskan dari derasnya arus globalisasi, termasuk konsekuensinya. Globalisasi memang telah meminggirkan peran negara, namun globalisasi tidak berarti menghilangkan sama sekali peran negara. Negara sebagai salah satu entitas politik tetap ada dan eksis, namun perannya tidak bersifat dominan lagi. Negara-negara seperti Cina (Kalathil & Boas 2001) dan Singapura (Madu 2004, 229-40) menjadi contoh-contoh sukses dari meningkatnya kapasitas negara dalam memanfaatkan internet untuk kepentingan keamanan nasional.

Selain negara, aktor-aktor politik lain muncul dan memperoleh peran dan pengaruh yang cukup signifikan. Posisi aktor non-negara dengan aktor negara tidak selalu stagnan dalam isu-isu tertentu. Di era internet, jaringan individu dan kelompok-kelompok individu yang melintas batas teritori nasional sebuah bangsa merupakan sebuah keniscayaan. Kemampuan aktor non-negara melakukan aktivisme *online* bisa melampaui kekuasaan negara, bahkan dapat menyebabkan potensi ketegangan hubungan antar negara.

Aktor Individu di Era Internet

Aktivisme politik *online* di antara warga masyarakat Indonesia dan Malaysia dalam perang *online* Ambalat merupakan sebuah fenomena yang kurang mendapat tanggapan serius, terutama dari pihak pemerintah negara masing-masing. Dalam HI kontemporer, peranan aktor-aktor non-negara dalam hubungan internasional, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs/ *Multinational Companies*) dan/atau transnasional (TNCs/ *Transnational Companies*) memang telah banyak menghasilkan studi akademis. Beberapa ilmuwan HI, misalnya dalam bidang Ekonomi Politik Internasional (EPI), seperti Susan Strange, Saskia Sassen, Craig N. Murphy, Phillip D. Cerny, Robert Isaak, Robert Gilpin, Robert Keohane, telah sejak tahun 1970-an menulis dan menjelaskan argumen-argumen mereka mengenai semakin pentingnya aktor-aktor ekonomi itu dan, sebaliknya, semakin tergerusnya kedaulatan dan legitimasi aktor negara oleh perusahaan-perusahaan raksasa itu. Keempat orang pertama tersebut termasuk ilmuwan berpengaruh dalam studi HI, khususnya EPI, di daratan Eropa. Karya dan pandangan mereka sangat mempengaruhi perkembangan ilmu HI yang berbasis di Eropa. Pengaruh itu bahkan memunculkan semacam perkubuan dalam studi HI antara Hubungan Internasional Eropa dan AS.

Kecenderungan mengenai naiknya pengaruh aktor non-negara dan berkurangnya peran aktor negara telah menciptakan sebuah sistem internasional dimana kekuatan kapital global mampu mendikte kebijakan-kebijakan negara (Greider 1995). Bahkan Susan Strange (1996, 4) menegaskan bahwa:

Where state were once masters of markets, now it is the markets which, on many crucial issues, are the masters over governments of states. And the declining authority to other institutions and associations, and to local and regional bodies, and in a growing asymmetry between the larger states with structural power and weaker ones without.

Dengan demikian, legitimasi dan otoritas aktor negara tidak lagi maksimal sebagaimana periode sebelumnya karena kekuasaan negara mulai memperoleh tantangan dari aktor-aktor non-negara, dalam hal ini TNCs/MNCs.

Masih sejalan dengan pandangan Susan Strange di atas, studi HI juga memasukkan beberapa bursa saham berpengaruh seperti Wall Street (AS), Nikei (Jepang), dan London sebagai pusat-pusat kekuasaan baru dalam finansial global. Konsentrasi perputaran uang global yang ada di ketiga bursa saham itu sangat memengaruhi hubungan politik internasional, begitu pula sebaliknya. Meskipun demikian, kekuasaan finansial ketiga bursa saham itu masih belum mampu mengalahkan tiga institusi global, yaitu Bank Dunia, IMF, dan Departemen Keuangan AS. Ketiga institusi ini sering disebut sebagai tiga pilar kekuasaan struktural global di bidang finansial, yang memiliki peran dan pengaruh paling penting dalam menentukan arah kebijakan finansial global.

Meskipun demikian, peran menonjol MNCs/TNCs dan lembaga keuangan global itu dalam mewarnai struktur ekonomi dan politik global tampaknya tidak meninggalkan kenyataan bahwa dalam situasi yang mendesak atau konfliktual, lembaga-lembaga itu masih memiliki ketergantungan dalam hal dukungan politik dari aktor negara. Sebuah MNCs yang berpusat di AS, misalnya, akan meminta dukungan politik AS untuk menyelesaikan persoalan cabang perusahaannya yang berada, misalnya, di Indonesia.³ Dukungan politik ini dapat berupa tekanan politik kepada negara yang menjadi *host* dari cabang MNCs itu. Sedangkan, peranan global Bank Dunia dan IMF secara nyata didasarkan pada dukungan politik AS, misalnya dalam bentuk persyaratan-persyaratan untuk memperoleh bantuan keuangan dan teknis dari kedua badan keuangan itu. Uraian ini menunjukkan bahwa aktor negara tampaknya masih berperan signifikan sebagai semacam *the last resort* bagi beberapa aktor non-negara, seperti MNCs/TNCs.

Sementara itu, Ambalat *netwar* memberi tempat bagi munculnya aktor-aktor non-negara yang bersifat personal/individual. Selama ini studi HI klasik/tradisional sebenarnya telah mempelajari peranan individu dalam memengaruhi hubungan antar-negara (Buzan 1983). Dalam skala pengaruh yang lebih besar daripada Ambalat *netwar* antara Indonesia dan Malaysia, salah satu fenomena global, yaitu peristiwa 9/11, juga berperan dalam memunculkan aktor individu yang mampu menandingi otoritas aktor negara. Sebelum serangan 9/11, individu yang mempunyai peran dan pengaruh dalam mewarnai hubungan internasional hanya terbatas pada orang-orang penting, baik dalam arti positif maupun negatif di tingkat negara dan internasional. Kepala negara/pemerintahan, menteri, tentara, para pakar dalam berbagai bidang selalu menempati urutan teratas di antara individu-individu yang berpengaruh dalam (studi) Hubungan Internasional.

Studi Peter M. Haas menemukan besarnya peran *epistemic community* dalam memengaruhi tatanan internasional (Haas 1992, 5; Adler 1992, 101). Menurut Haas, komunitas epistemis terdiri dari suatu jaringan orang-orang profesional dengan keahlian dan kompetensi dalam satu bidang tertentu dengan suatu klaim otoritas terhadap suatu pengetahuan yang berhubungan dengan kebijakan dalam bidang isu tersebut. Dalam hal ini, komunitas epistemis hanya terbatas pada orang-orang tertentu yang memiliki keahlian tertentu yang bersifat positif bagi perkembangan dan perubahan sebuah tatanan global.

Dibandingkan dengan kecenderungan analisis dan studi HI selama ini, terorisme 9/11 ternyata menunjukkan sesuatu yang agak berbeda. Peristiwa terorisme 9/11

³ Misalnya kasus Freeport di Propinsi Papua pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang menyebabkan pemerintah AS mengirim mantan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger untuk melobi pemerintah Indonesia. Kasus aktual lainnya adalah intervensi Duta Besar AS Ralph Boyce terhadap penahanan Presiden Direktur PT Newmont Minahasa oleh pihak Kepolisian RI.

secara tidak disengaja telah memungkinkan orang-orang biasa ---baik secara individual maupun kelompok--- yang tidak memiliki jabatan atau kemampuan untuk ikut berperan dalam memengaruhi hubungan antar negara. Orang-orang ini secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam *non-epistemic community*. Sebelum serangan terorisme 9/11, nama-nama pelaku serangan terhadap WTC dan Pentagon tidak dikenal dalam studi terorisme. Osama bin Laden sudah dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang terlibat dalam kegiatan terorisme sejak 1998, namun hanya pemerintah AS (pada masa Presiden Bill Clinton) yang memiliki daftar itu. Analisis HI yang hanya berpusat pada negara (*state-centered analysis*) tidak mengenal dan kurang memperhitungkan dampak strategis dari kegiatan terorisme Osama bin Laden dan kelompok-kelompok lainnya. Demikian pula sebelum peristiwa bom Bali, pemerintah Indonesia ---apalagi ilmuwan HI dan penstudi terorisme global--- tidak tahu nama dan latar belakang orang-orang seperti Imam Samudra, Muklas, Dr. Azahari, Noordin M. Top, dsb. Tingkat analisis individual kembali memperoleh perhatian penting dan menjadi salah satu analisis yang menarik dalam menjelaskan terorisme atau fenomena kontemporer lain dalam studi HI (Whittaker 2004, 63-74).

Sementara itu, kasus Ambalat *netwar* tidak memunculkan nama-nama tertentu sebagai pelaku *cyberattack* ke berbagai situs, baik milik pihak Indonesia atau Malaysia. Satu faktor paling mendasar yang perlu dipahami dalam *cyberspace* --- dan membedakan Ambalat *netwar* dengan terorisme 9/11--- adalah bahwa revolusi informasi kontemporer pada saat ini bersifat global. Terorisme 9/11 masih mengandalkan faktor-faktor geografis sebagai basis perjuangan dan target pelaksanaan serangan teroris. Cara berpikir yang sama tidak bisa diterapkan dalam memahami Ambalat *netwar*. Walaupun hanya melibatkan pihak bilateral antara Indonesia dan Malaysia, perang *online* Ambalat menjadikan jaringan internet sebagai "arena" peperangan (*battlespace*), sehingga jaringan internet pun tidak bisa dibagi-bagi atau diperebutkan berdasarkan pertimbangan wilayah-wilayah geografis sebagaimana perang konvensional.

Selanjutnya, sifat global dari jaringan internet ternyata tidak bisa menjamin bahwa akhiran (*suffix*) pada alamat-alamat berbagai situs ---misalnya "edu", "org", "com"--- melekat pada geografis tertentu. Bahkan, akhiran untuk negara seperti "au" (Australia), "uk" (Inggris), "id" (Indonesia), dan seterusnya juga tidak bisa dipakai sebagai panduan bahwa pemilik situs tersebut berada di negara atau wilayah negara yang bersangkutan (Keohane & Nye 2001, 608). Orang Indonesia yang berdomisili di Austria bisa saja terlibat dalam Ambalat *netwar* dengan menggunakan akhiran "id" sebagai representasi atas identitasnya pada pesan-pesan atau gambar-gambar yang disampaikan di berbagai situs milik Malaysia.

Perkembangan tersebut merupakan fungsi dari globalisasi. Globalisasi dalam bentuk kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah

memungkinkan orang-orang biasa untuk menjalin komunikasi dengan individu lain di negara-negara berbeda. Internet, misalnya, menyediakan berbagai macam informasi, baik dalam konteks positif maupun negatif, bagi semua orang untuk 'belajar' secara otodidak. Studi HI klasik telah mengantisipasi pengaruh perkembangan teknologi dalam hubungan antar-negara (Palan 1997, 13-26; Strange 1998, vii-viii). Bahkan, Susan Strange telah menempatkan teknologi sebagai salah satu aspek penting yang mendukung kekuasaan struktural (*structural power*) pengetahuan dalam hubungan internasional (Strange 1994, 119-138).

Orang-orang biasa mengenal kata bijak '*knowledge is power*', sebagaimana kutipan di awal tulisan ini. Perkembangan teknologi yang pesat telah memberi kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Orang mungkin melupakan kenyataan bahwa seorang Imam Samudra sempat mengakses internet di beberapa warnet dengan memakai *IP address*⁴ luar negeri selama periode pengejaran polisi sejak peristiwa bom Bali hingga penangkapannya. Penguasaan teknologi informasi telah memberi akses bagi individu biasa di luar komunitas epistemis untuk membangun sebuah jaringan transnasional yang secara gradual dapat berubah menjadi sebuah kekuasaan struktural di bidang pengetahuan. Begitu besarnya pengaruh internet, sehingga isu *digital divide*⁵ yang secara inheren melekat dalam perkembangan internet di negara-negara sedang berkembang menjadi tereduksi dan tidak relevan lagi untuk dianggap sebagai persoalan serius dalam mengakses internet. Karena itu, teknologi informasi, khususnya internet, memberi peluang besar dalam memberdayakan aktor-aktor non-negara dalam hubungan internasional.

Catatan Penutup

Ambalat *netwar* merupakan fenomena baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Untuk pertama kalinya, "perang" antara kedua negara bertetangga ini berlangsung di jaringan internet, menggunakan *cyberattacks* berupa pesan dan/atau gambar, dan serangan *online* ditujukan kepada situs-situs milik kedua belah pihak. Implikasi Ambalat *netwar* dalam meningkatkan peran dan pengaruh aktor individu dalam interaksi antar-negara memang tidak sebesar peristiwa terorisme 9/11. Namun demikian, Ambalat *netwar* tetap memberi

⁴ Penggunaan dan perubahan *IP address* memerlukan pengetahuan teknis internet beberapa tingkat di atas pemakai internet pada umumnya.

⁵ *Digital divide* merupakan terminologi populer yang dipergunakan dalam wacana penggunaan internet. Terminologi ini merujuk pada kesenjangan akses terhadap internet di antara semua penduduk di dunia. Kesenjangan akses internet ini berakar pada tingkat pendidikan (termasuk penguasaan bahasa Inggris sebagai *lingua franca* dalam memakai internet), letak geografis, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.

implikasi signifikan dalam analisa hubungan internasional, baik secara empiris maupun teoritis. Dalam konteks empiris, perang *online* Ambalat secara jelas menghadirkan aktor individu dengan kemampuan teknis-komputasi untuk melakukan sebuah tindakan politik yang memengaruhi hubungan konflik dan kerjasama antara dua atau lebih negara. Individu dengan kuasa struktural di bidang pengetahuan muncul sebagai aktor penting yang tidak lagi tergantung sepenuhnya pada negara dalam interaksi global dengan aktor-aktor lain dalam politik global kontemporer.

Selain itu, Ambalat *netwar* juga hanya menghadirkan aktor-aktor individu sebagai aktor utama dalam perang *online* tersebut. Dengan kata lain, aktor-aktor negara tetap mempertahankan dan melakukan diplomasi damai untuk menghentikan krisis (*offline*) Ambalat. Dibandingkan dengan terorisme 9/11, jika negara Indonesia dan Malaysia ikut terlibat sebagai aktor utama, maka perang riil yang melibatkan angkatan bersenjata masing-masing negara tidak bisa dielakkan. Selanjutnya, kecenderungan perang yang melibatkan aktor negara akan menimbulkan dampak lebih luas dan lebih merugikan.

Sifat global yang tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu merupakan kontribusi teoritis penting dari Ambalat *netwar* antara Indonesia dan Malaysia. Perang antarnegara di era Internet tidak bisa lagi diidentifikasi semata berdasarkan akhiran (*suffix*) yang tertera pada alamat situs yang ada. Kontribusi teoritis lain dari Ambalat *netwar* adalah bahwa kuasa struktural di bidang pengetahuan yang dimiliki aktor-aktor individu di era internet juga dapat dianggap sebagai kuasa lunak (*soft power*), menurut Nye (2001). Individu-individu pemilik kuasa lunak tidak memerlukan lagi *hard power* dalam bentuk infrastruktur dan peralatan militer ketika harus menghadapi situasi konfliktual.

Fenomena Ambalat *netwar* setidaknya menyadarkan masyarakat Indonesia mengenai potensi signifikan yang *inheren* pada internet sebagai perangkat bagi aktivisme politik *online*, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kondisi riil mengenai persebaran dan penetrasi internet yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia ternyata tidak berkorelasi positif dengan pemanfaatan internet sebagai alat bagi aktivisme politik *online*. Apalagi, pemanfaatan internet dalam aktivisme politik *online* pada Ambalat *netwar* ternyata telah mengakibatkan persoalan tersendiri dalam isu keamanan bilateral. Bagi hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia, fenomena Ambalat *netwar* tampaknya tidak bisa dibiarkan berkembang begitu saja tanpa keterlibatan aktor negara (pemerintah) dalam rangka *internet governance*.

Tabel 1
Daftar Situs (di) Malaysia yang menjadi Sasaran *e-Ganyang*

1. Universiti Sains Malaysia (2x)
2. Malaysian Communications and Multimedia Commission
3. Suhakam
4. Ministry of Energy, Water and Communications
5. Jabatan Kerja Raya (2x)
6. Royal Malaysian Customs
7. KLpages.com
8. mobile2u.com.my
9. Sultan of Perak
10. Perak Museum
11. XPTranslation's (BBS)
12. Jabatan Perkhidmatan Penerangan Malaysia, Perak (2x)
13. Perak Veterinary Department
14. Multimedia University
15. National Productivity Council
16. United Nations Development Programmes in Malaysia
17. Malaysian Amateur Radio Emergency Services Society
18. Islamic Information & Services Foundation (IIS)
19. Japan Club KL forum
20. Terra-Lingua (situs austria)
21. TourMalaysia Travel Agency
22. Era Edar Marketing Sdn Bhd
23. PriceTheCar.com.my (Forum)
24. Riftec Technology (Forum)
25. Computer.net.my (Forum)
26. Learning.com.my
27. tbw.com.my
28. Malaysian BMW Club

Sumber: Wicaksono Hidayat, 2005. Aksi Ganyang Situs Malaysia: Cyberwars Makin Panas . [online]. dalam <http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/03/tgl/10/time/151240/idnews/388272/idkanal/324> [diakses 20 Juli 2005].

Tabel 2
Sasaran *e-Godam* terhadap Situs-situs Indonesia

<p>http://webserver.sby.rad.net.id/ http://www.surya.co.id/ http://www.indoturtle.web.id/ http://www.cta.co.id/ http://dev.surya.co.id/ http://www.gafeksi.or.id/ http://www.surabaya-noor.com/ http://www.sby.rad.net.id/ http://www.bumipalapa.co.id/ http://www.apbmi-sby.or.id/ http://www.dinamikacargo.co.id/ http://www.contiforma.co.id/ http://www.fourthr.co.id/ http://www.gapeknasjatim.or.id/ http://www.gigafm.co.id/ http://www.ginsi-jatim.or.id/ http://www.ibmt.ac.id/ http://www.iglas.co.id/ http://www.imcsby.or.id/ http://www.itps-sby.ac.id/ http://www.laban-raja.co.id/ http://www.mesran.co.id/ http://www.metrofm.co.id/ http://www.wijayafm.co.id/ http://www.ptbbi.co.id/ http://www.stieprimavisi.ac.id/ http://www.pt-gcs.co.id/ http://www.stiep.ac.id/ http://www.tulungagung.go.id/ http://www.ometracoaryasamanta.co.id/ http://www.st-louis1-sby.sch.id/ http://kpu.surabaya.go.id/</p>
--

Sumber: Bukit Besi Online, 2005. Perang Siber antara Malaysia -Indo. [online]. dalam <http://72.14.253.104/search?q=cache:7LicamoICXgJ:221042.ds.nac.net/~qayyim/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D317+ambalat+godam+indonesi a&hl=en&ct=clnk&cd=7> [diakses 20 Juli 2005].

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

- Abbott, Jason, 2001. Democracy@Internet.Asia? The Challenges to Emancipatory Potential of the Net: Lessons from China and Malaysia. *Third World Quarterly*, **22** (6), hlm. 99-144.
- Adler, Emmanuel, 1992. The Emergence of Cooperation: National Epistemic Community and the International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control. *International Organization*, **46** (1), hlm. 101.
- Arquilla, John dan David Ronfeldt eds., 1993. Cyberwar Is Coming. *Comparative Strategy*, **12**.
- 1996. The Advent of Netwar, *RAND*. dalam Phill Williams et al. eds., *Classic Readings of International Relations*. Orlando: Harcourt Brace & Co, 1999.
- Buzan, Barry, 1983. *People, States and Fear: the National Security Problem in International Relations*. Brighton: Wheatsheaf Books.
- Capling, Ann, 2001. Death of Distance or Tyranny of Distance? The Internet, Deterritorialisation and the Anti-Globalisation Movement. *Pacific Review*. **14** (3).
- Cairncross, Frances, 2001. *The Death of Distance: How the Communications Revolution is Changing Our Lives*. Boston: Harvard Business School Press.
- Everard, Jerry, 2000. *Virtual States: the Internet and the Boundaries of the Nation State*. New York: Routledge.
- Friedman, Thomas, 2005. *The World is Flat: A Brief History of the Twentieth Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Greider, William, 1995. *One World Ready or Not: the Manic Logic of Global Capitalism*. New York: Simon & Schuster.
- Haas, Peter M., 1992. Introduction: Epistemic Community and International Policy Coordination. *International Organization*. **46** (1), hlm. 5.

- Jordan, Tim, 2004. *Hactivism and Cyberwars: Rebels with a Cause*. New York: Routledge.
- Kalathil, Shanti dan Taylor Boas, 2001. *The Internet and State Control in Authoritarian Regimes: China, Cuba, and the Counterrevolution*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Keohane, Robert dan Joseph S. Nye, 2001. Power, Interdependence, and the Information Age. dalam Richard K. Betts, ed. *Conflict after the Cold War: Arguments on Causes of War and Peace*. New York: Pearson Education Inc, 2005.
- Madu, Ludiro, 2002. Cyberpolitics and the Aceh Separatism of Indonesia. *Paradigma: Jurnal Masalah-Masalah Kebijakan*, VI (16), hlm. 59-66.
- 2004. Intelligent State: Demokrasi, Kontrol Negara, dan Internet di Singapura. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, II (2):, hlm. 229-240.
- , 2007. Nasionalisme & Internet: Krisis Ambalat antara Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5 (1), hlm. 20-32.
- Margolis, Michael dan David Resnick eds., 2000. *Politics as Usual: The Cyberspace Revolution*. London: Sage Publication Co.
- Meikle, Graham, 2002. *Future Active: Media Activism and the Internet*. London: Routledge.
- Ohmae, Kenichi, 1990. *The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy*. New York: Harper Business.
- Palan, Ronen, 1997. Technological Metaphor and Theories of International Relations, dalam Michael Talalay et al., eds. *Technology, Culture, and Competitiveness: Change and the World Political Economy*. London: Routledge.
- Resnick, David, 1998. Politics on the Internet: the Normalization of Cyberspace. dalam Jim Thomas, 2005. The Moral Ambiguity of Social Control in Cyberspace: A Retroassessment of the 'Golden Age' of Hacking, *New Media and Society*, 7 (5), hlm. 599-624.
- Strange, Susan, 1994. *State and Market*. 2nd ed. London & New York: Pinter.

----- 1996. *Retreat of the State: the Diffusion of Power in the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

----- 1998. Forward. dalam Ronen Palan dan Barry Gills, eds. *Trancending the State-Global Divide: A Neostrukturalist Agenda in International Relations*. London: Lynne Rienner.

Tolouse dan Luke eds. (n.d). *The Politics of Cyberspace: A New Political Science Reader*. New York & London: Routledge.

Robbles, A.C., 2001. Internet and Democracy. *Panorama*. (3). Jerman: Konrad Adenaur Stiftung.

Warkentin, Craig, 2001. *Reshaping World Politics: NGOs, the Internet, and Global Civil Society*. Maryland: Rowman & Littlefield Publication, Inc.

Whittaker, David J., 2004. *Terrorists and Terrorism in the Contermprary World*. London & New York: Routledge.

Situs Internet

Bee, 2005. Gerakan "Ambalat Belongs to Indonesia", [online] 10 Maret. dalam [http:// beeography. modblog.co m/?show=blogview&blog_id=502615](http://beeography.modblog.com/?show=blogview&blog_id=502615), [diakses 25 April 2006].

Dartnell, Michael, 2001. The Electronic Stary Plough: The Enationalism of the Irish Republican Socialist Movement (IRSM). *First Monday Journal of Internet*, [online]. 6 (12), dalam http://www.firstmonday.org/issues/issue6_12/dartnell/index.html, [diakses 21 Januari 2004].

Matnet, 2005. Godam Indon, 11 Maret. dalam <http://www.kedahonline.net/v6/html/modules.php?name=News&file=article&sid=517>, [diakses 25 April 2006].

The Sydney Morning Herald, 2005. 'Ban Bali' Website Hacked in First Hour, [online] 30 Mei. dalam [http:// www.smh.com.au/news/National/Ban -Bali-website-hacked-in-firsthour/ 2005/05/30/ 111730555 2254.html](http://www.smh.com.au/news/National/Ban-Bali-website-hacked-in-firsthour/2005/05/30/1117305552254.html), [diakses 26 Januari 2005].

Wicaksono Hidayat, 2005. Aksi Ganyang Situs Malaysia: Cyberwars Makin Panas. [online]. dalam <http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/03/tgl/10/time/151240/idnews/388272/idkanal/324> [diakses 20 Juli 2005].